

PENGURUS DEWAN KEBUDAYAAN DIY DIKUKUHKAN

Optimis Sumbu Filosofi Segera Disidangkan



KR-Franz Boedisoeekamanto
Gubernur DIY Sultan HB X mengukuhkan Pengurus Dewan Kebudayaan DIY.

YOGYA (KR) - Keberadaan Dewan Kebudayaan DIY diharapkan mampu berperan lebih sebagai pemelihara dan pengembangan kebudayaan, dengan mempersiapkan sistem kuratorial kebudayaan. Karena itu kebudayaan harus dipahami wujudnya sebagai kompleks nilai-nilai dan gagasan yang isinya meliputi seluruh hakikat kehidupan. Selain itu tidak boleh ada penyempitan makna kebudayaan hanya dalam arti seni saja dan hanya diterima sebagai sekadar pewarisan.

"Ada dua hal yang berkaitan de-

ngan kebudayaan, meliputi strategi kebudayaan sebagai usaha *survival and winning*, dan kebudayaan sebagai Pilar Ketiga Keistimewaan DIY. Artinya, dalam memelihara keberlanjutan budaya Keistimewaan itu perlu penguatan ketahanan dan memenangkan prioritas pemajuan kebudayaan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat mengukuhkan Pengurus Dewan Kebudayaan DIY masa bhakti 2020-2022 di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (11/8).

Ketua Dewan Kebudayaan DIY periode 2020-2022 dipercayakan kepada Dr Djoko Dwiyanto MHum.

Sedangkan Djoko Dwiyanto menyatakan siap memberikan masukan kepada Gubernur DIY untuk mendukung perumusan kebijakan kerja sama dengan UNESCO perihal pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia.

"Pengusulan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia sudah dijadwalkan untuk disidangkan di Jakarta pada 2019 lalu, namun karena pandemi Covid-19 menjadi tentative. Kalau tidak ada halangan kami berharap Sumbu Filosofi bisa disidangkan tahun ini, karena Sawahlunto sudah disidangkan menjadi warisan budaya dunia tahun lalu," tutur Djoko.

Djoko berharap personel Dewan Kebudayaan DIY dapat menyumbangkan pikirannya sesuai harapan *Ngarsa Dalem* serta amanat dari Perda dan Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY. Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY pun telah membentuk Tim Pengajuan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia yang kebetulan salah satunya merupakan pengurus Dewan Kebudayaan DIY.

(Ria/Ira)-f

VERIFIKASI SELESAI, SK SEGERA TERBIT

Pesantren Terima Bantuan Rp 25 Juta-Rp 50 Juta

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp 2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19 ini.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengatakan, proses verifikasi penerima bantuan sudah selesai dan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam akan segera terbit. "Insya Allah, SK Bantuan Pesantren akan terbit tanggal 12 atau 13 Agustus 2020 ini. Proses verifikasi sudah selesai," terang Waryono di Jakarta, Selasa (11/8).

Dijelaskan, SK sudah mencantumkan nama pesantren dan lembaga

pendidikan keagamaan Islam, lengkap dengan alamat dan nomor rekening yang telah dibuat Tim Direktorat. "Para penerima akan mendapat surat pemberitahuan sebagai penerima, termasuk bagaimana mencairkannya," sambungna.

Waryono menambahkan, anggaran akan diberikan sebagai bantuan operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren. Jumlah ini terdiri 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp 25 juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp 40 juta. "Bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren kategori besar dengan

santri di atas 1.500 orang dan nilai bantuannya Rp 50 juta," ujarnya.

Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp 10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Alquran (LPQ), masing-masing LPQ akan mendapat bantuan Rp 10juta.

"Selain bantuan operasional, Kemenag juga memberikan bantuan pembelajaran daring kepada 14.115 lembaga. Masing-masing lembaga akan mendapat Rp 15juta, namun diberikan perbulan Rp 5juta selama tiga bulan," tandasnya.

(Ati)-f

Sultan

masih masuk zona hijau, kuning, atau malah sudah oranye. Jadi harus benar-benar cermat, seandainya pembelajaran tatap muka diadakan sebaiknya dimulai dari kampus, baru kemudian diikuti jenjang pendidikan di bawahnya," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (11/8).

Menurut Sultan, seandainya sekolah mau melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melalui perencanaan secara matang. Karena dirinya tidak mau jika harus mempertaruhkan nasib anak-anak jenjang pendidikan terendah dengan mengizinkin tatap muka. Mengingat risikonya untuk anak-anak yang terlalu besar jika sekolah dibuka

tanpa perencanaan yang baik. Terlebih Yogya belum mencabut status tanggap darurat bencana Covid-19 sampai akhir Agustus. "Guna memudahkan pemetaan dan mengetahui kondisi di lapangan. Saat ini swab massal terus kami gencarkan. Semua itu kami lakukan dengan harapan punya kepastian lebih dulu daripada coba-coba risikonya terlalu besar," ujar Sultan

Sedangkan Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan mempersilakan apabila ada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah siap mengambil keputusan melakukan pendidikan tatap muka di September 2020 dan sudah tidak mungkin ditunda lagi. Namun yang penting pelaksanaan pem-

belajaran tatap muda di lingkungan perguruan tinggi di DIY tersebut dilakukan secara bertahap. "Pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara bertahap itu maksudnya ada beberapa perguruan tinggi yang mendahulukan mereka yang menyelesaikan tugas akhir. Ataupun mahasiswa baru (maba) sebelum pembelajaran dalam jaringan (daring) karena jika belum pernah ketemu akan sulit apabila menjadwalkan kuliah daring," ujar Baskara Aji.

Baskara Aji mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau luar jaringan (luring) ini sebenarnya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Wilayah V.

(Ria/Ira)-f

Asparagus

Kandungan nilai gizinya sangat tinggi sehingga produk asparagus banyak diminati pasar, bahkan permintaan pasar sering kekurangan. "Kekurangan produk asparagus terjadi karena masih rendahnya produktivitas asparagus itu sendiri," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, budidaya asparagus di Pulau Jawa hanya ada di Bandung dan Malang. Karena itu, melihat peluang

tersebut pada tahun lalu pihaknya mencoba berinisiatif menanam asparagus.

"Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan dan akhirnya dari percobaan tersebut sampai saat ini sudah hampir 14 hektare lahan tanaman asparagus yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Temanggung," katanya.

Sekretaris ATAF Fauzin Wahid mengatakan, saat ini ATAF baru menembus retail nasional di Jateng dan DIY.

Guru

Mereka saat ini sedang dalam kesulitan karena terdampak pandemi Covid-19. Terlebih bagi mereka yang mengajar di sekolah/madrasah swasta.

Sekolah/madrasah swasta sedang dalam kesulitan finansial. Sebagian besar orangtua murid tidak mampu membayar iuran penyelenggaraan pendidikan. Pada hal pos itulah yang menopang operasional sekolah/madrasah swasta. Banyak sekolah/madrasah swasta yang mulai 'merasionalisasi' guru dan karyawannya karena kemampuan finansial sekolah/madrasah berkurang signifikan.

Bagi sekolah swasta, finansial merupakan 'urat nadi kehidupan'. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah tidak mampu menopang keseluruhan biaya operasional sekolah/madrasah swasta. Gaji guru dan karyawan, pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, pengembangan sistem manajemen, dan program peningkatan mutu pendidikan berkelanjan masih mengandalkan iuran penyelenggaraan pendidikan dari orangtua murid.

Keadaan ekonomi sebagian besar orangtua murid sedang tidak baik. Pendapatan mereka berkurang bahkan

h nihil, sebab 'dirumahkan'. Faktor inilah penyebab rendahnya sekolah/madrasah swasta memperoleh *fundrising*. Di lain pihak, pembelajaran dari rumah secara daring membutuhkan dukungan pembiayaan dalam bentuk ketersediaan perangkat komputer, laptop, gawai, paket data, dan 'sewa' jaringan aplikasi yang harus disediakan orangtua murid. orangtua lebih memprioritaskan keberlangsungan belajar anak-anaknya daripada memenuhi kewajiban membayar iuran penyelenggaraan pendidikan ke sekolah/madrasah.

Untuk dapat bertahan dalam situasi krisis seperti ini bukan berarti sekolah/madrasah tanpa melakukan daya upaya. Semua daya upaya ini tidak banyak menolong. Sekolah/madrasah tetap dalam kesulitan finansial. Nafkah untuk guru dan karyawan dihentikan. Sebagian guru terpaksa 'dirumahkan' tanpa jaminan penghasilan. Akibatnya, guru tidak mampu lagi menafkahi diri dan keluarganya.

Rencana pemerintah memberi bantuan untuk karyawan swasta membuka asa bagi guru swasta. Alangkah bijak apabila pemerintah juga memberi bantuan untuk

guru swasta. Paling tidak ada tiga nilai kebaikan guru swasta diberi bantuan sebagaimana yang akan diberikan kepada karyawan swasta. (1) Memberi jaminan hidup bagi guru swasta beserta keluarganya. (2) Membuka peluang agar sekolah/madrasah tetap dapat bertahan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar dan (3) Mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Saat ini yang terpenting bukan bagaimana menyelamatkan sekolah/madrasah dari kebangkrutan. Tetapi memberi bantuan kepada guru swasta bukan tidak mungkin akan berdampak mampu 'memperpanjang napas' sekolah/madrasah swasta melanjutkan pengabdianya kepada bangsa dan tanah air. Tidak berlebihan harapan guru swasta mendapatkan bantuan pemerintah selain untuk menyambung hidup. Jika memang ada kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib para guru swasta, memberi kemudahan mengakses bantuan pemerintah adalah kebijakan yang sangat terpuji. Misalnya, guru swasta tidak harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. *(Penulis adalah praktisi pendidikan dan kebudayaan)-d*

Daihatsu Edukasi Konsumen

JAKARTA (KR) - Kebijakan Pemerintah yang akan menggenjot belanja negara pada Semester II-2020 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia terhindar dari resesi serta pemberian insentif untuk dunia usaha, disambut positif pelaku usaha termasuk sektor otomotif yang mulai bergerak.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil menunjukkan peningkatan seiring dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

After Sales Service Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Lili Herman di Jakarta, Selasa (11/8) mengatakan, pascapelonggaran PSBB, Daihatsu mengedukasi konsumen agar melakukan servis rutin mobilnya ke bengkel Daihatsu. Salah satunya dengan memberikan insentif menarik dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dikatakan, langkah yang

KR-Istinewa
Lili Herman melihat kesiapan bengkel di Sunter, Jakarta.

ditempuh itu memberi dampak positif. Pengunjung bengkel Astra Daihatsu mulai membaik, animo konsumen meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung bengkel Astra Daihatsu dan dealer Daihatsu yang terus naik. Jika pada Mei 2020 pengunjung bengkel Astra Daihatsu dan dealer Daihatsu sebanyak 52.695 unit, pada Juni 2020 meningkat menjadi 82.633 unit (naik 56,8%). Pada Juli 2020 tercatat 87.172 unit atau bertambah 5,5% dari Juni 2020.

"Jadi, memang ada kenaikan pengunjung bengkel dari rata-rata 2.000 unit perhari menjadi 2.300 unit per-

hari. Padahal, saat ini jam operasional bengkel masih dibatasi," katanya.

Lili menjelaskan, untuk mendorong konsumen datang ke bengkel atau memanfaatkan Daihatsu Mobile Service (DMS), pada Agustus ini, seluruh bengkel Astra Daihatsu dan dealer Daihatsu memberikan program diskon khusus dalam rangka HUT Kemerdekaan RI.

Konsumen mendapatkan diskon Rp 100.000 untuk tune up atau cek rem. Sedangkan perawatan berkala bisa mendapatkan diskon jasa 17%, diskon suku cadang 8%, dan diskon oli genuine oil 20%. **(San)-f**

Bansos Sambungan hal 1

yang sama-sama penting sehingga tidak bisa hanya mengurus Covid-19, namun soal ekonominya tidak diurus yang akhirnya juga menimbulkan problem sosial di masyarakat.

"Oleh sebab itu, berulang-ulang saya sampaikan gas dan remnya ini Bupati, Walikota, Gubernur ini betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik," tutur Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan kembali urusan bantuan sosial (bansos) agar dicek be-

tul jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat kekurangan sembako sehingga jika ada yang perlu dibantu dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

Berkaitan dengan bansos, Presiden menyampaikan bahwa dari pusat sudah diberikan bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) untuk desa, subsidi listrik gratis untuk pemakaian 450 VA, 50% bagi 900 VA serta stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil lewat perbankan.

(Sim)-f

Pematokan Sambungan hal 1

pembayaran ganti untung dapat dilakukan sebelum akhir tahun secara bertahap. Sebab tahapan kegiatan pembangunan sudah memasuki etape pengadaan tanah, begitu patok dipasang.

"Pematokan akan menghadirkan perwakilan dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah setempat khususnya dari wilayah-wilayah yang terkena dampak pembangunan Tol Yogya-Solo. Jadi tidak hanya perwakilan dari Kecamatan Kalasan saja yang diundang, tetapi sampai ke Kecamatan Depok, Mlati dan sebagainya, ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pengajian," katanya.

Krido menjelaskan, untuk pembayaran ganti untung kepada warga terdampak akan melibatkan Tim Appraisal (Penaksir) Tanah independen, karena hal ini bukan merupakan proses jual beli tetapi pelepasan tanah. Di samping itu, peran pemilik lahan sangat strategis untuk memberikan informasi lengkap terkait proses penaksiran tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut.

"Kami harapkan pembayaran ganti untung untuk pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo tersebut dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2020 ini, yang telah disampaikan kepada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (Satker PJBH). Tim Pengadaan Lahan yang dikomandani Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY yang akan melakukan pembayaran ganti untung, kami Tim Persiapan hanya bertugas sampai pemasangan patok," tandas Krido.

Pihaknya saat ini juga sedang mengawali proses sosialisasi pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen sepanjang 7,65 km ini, disusul konsultasi publik supaya paralel dengan tahapan pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo.

Pelaku

Selain saksi-saksi, pihaknya juga telah mengumpulkan rekaman CCTV yang ada di sekitar kompleks masjid atau lingkungan kampus. "Pelaku masih dalam penyelidikan. CCTV sekitar lokasi ada banyak dan sudah kami *backup* semuanya," tandasnya.

Sementara itu, setelah satu jam melakukan penanganan, petugas Jibom Brimob Polda DIY memastikan tidak ada unsur bom dalam benda mencurigakan tersebut. Hal itu ditegaskan Kasubden Jibom Brimobda Polda DIY AKP Suropto. Namun, meskipun tidak ada unsur bom, temuan itu termasuk teror karena ada tulisan bernada ancaman juga ditemukan di rangkaian menyerupai bom.

"Kalau unsur terornya ada, menakut-nakuti ada, tapi untuk mencelakai tidak ada. Ada timer, jam digital kemudian bentuk seolah menyerupai gambar bom itu ada. Tapi semuanya tak memenuhi unsur bom," tegas Suropto.

Setelah dinyatakan aman, temuan itu langsung limphakan

Bidang terdampak lebih kurang lebih 915 bidang dengan keluasan 496.209 meter persegi dan sasaran sekitar 945 warga terdampak. Tim Persiapan juga akan melakukan evaluasi sosialisasi pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen pada 14 Agustus 2020, agar pekan depan dijadwalkan konsultasi publik dengan target *clear* September 2020. Dengan demikian proses kelengkapan pendataan awal penyusunan Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur DIY bisa dilakukan paralel dengan pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo.

"Kami berharap untuk pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen tidak perlu dibentuk Tim Keberatan seperti pada pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo, karena masyarakat terdampak sudah menyetujui. Untuk itu, kami tetap akan mengedepankan pendekatan orang perorang guna memberikan pemahaman masyarakat dengan informasi yang utuh guna mengantisipasi munculnya keberatan. Kita lakukan antisipasi kerawanan terhadap adanya situasi wilayah perbatasan di mana ada suatu bidang milik satu orang yang terkena tiga area simpul jalan tol di DIY," terang Krido.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan Tol Yogya-Solo maupun Tol Yogya-Bawen sudah cukup bagus. Artinya mereka memberikan respons positif dan tidak mempersulit program yang direncanakan atau akan dilakukan. Terlebih pembangunan jalan tol dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemda DIY berharap agar proses selanjutnya bisa didukung masyarakat, sehingga tahapan yang sudah ditentukan bisa diselesaikan secara tepat waktu.

(Ira/Ria)-d

Sambungan hal 1

tidak terulang. Ia mengingatkan setiap orang dan para penjaga agar waspada terhadap hal mencurigakan. "Khususnya untuk takmir masjid, harus waspada dan jika ada hal mencurigakan harus segera dilaporkan," tegasnya.

(Ayu/R-1)-d

